

*Jurnal*  
**YUDISIAL**

Vol. 10 No. 1 April 2017 Hal. 1 - 114

# “ABROGATIO LEGIS”



**KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA**



**J**urnal Yudisial merupakan majalah ilmiah yang memuat hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Jurnal Yudisial terbit berkala empat bulanan di bulan April, Agustus, dan Desember.

Penanggung Jawab: Danang Wijayanto, Ak., M.Si.

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

Redaktur: 1. Roejito, S.Sos., M.Si. (Administrasi Negara dan Kebijakan Publik)  
2. Drs. Hamka Kapopang (Komunikasi)

Penyunting: 1. Imran, S.H., M.H. (Hukum Pidana)  
2. Dinal Fedrian, S.IP. (Ilmu Pemerintahan)  
3. Muhammad Ilham, S.H. (Hukum Administrasi Negara)  
4. Ikhsan Azhar, S.H. (Hukum Tata Negara)  
5. Atika Nidyandari, S.H. (Hukum Dagang)  
6. Nurasti Parlina, S.H. (Hukum Pidana dan Perdata)

Mitra Bestari: 1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. (Filsafat Hukum dan Penalaran Hukum)  
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum. (Metodologi Hukum dan Etika)  
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. (Hukum Pidana dan Viktimologi)  
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL. (Hukum Pidana, HAM dan Gender)  
5. Hermansyah, S.H., M.Hum. (Hukum Ekonomi/Bisnis)  
6. Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H. (Filsafat Hukum dan Sosiologi Hukum)  
7. Prof. Dr. H. Yuliandri, S.H., M.H. (Ilmu Perundang-undangan)

8. Prof. Dr. Ronald Z. Titahelu, S.H., M.S. (Hukum Agraria dan Hukum Adat)
9. Dr. H. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum. (Ilmu Hukum/Ilmu Politik)
10. Mohamad Nasir, S.H., M.H. (Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam)

Sekretariat:

1. Agus Susanto, S.Sos., M.Si.
2. Yuni Yulianita, S.S.
3. Noercholysh, S.H.
4. Wirawan Negoro, A.Md.
5. Didik Prayitno, A.Md.
6. Eka Desmi Hayati, A.Md.

Desain Grafis

dan Fotografer:

1. Arnis Duwita Purnama, S.Kom.
2. Widya Eka Putra, A.Md.

Alamat:

Sekretariat Jurnal Yudisial

Komisi Yudisial Republik Indonesia

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906189

E-mail: [jurnal@komisiyudisial.go.id](mailto:jurnal@komisiyudisial.go.id)

Website: [www.jurnal.komisiyudisial.go.id](http://www.jurnal.komisiyudisial.go.id)

## ”ABROGATIO LEGIS”

Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 1 April 2017 hadir kembali dengan membawa tema ”ABROGATIO LEGIS” yang bermakna pencabutan aturan undang-undang atau hukum. Tema ini sekalipun menggambarkan tentang bagaimana aturan hukum dicabut secara formal sehingga tidak memiliki keberlakuan formal, tetapi lebih luas menggambarkan dinamika ketika aturan yaitu undang-undang tiba-tiba mengalami “kehilangan atau kekosongan makna,” maka kemudian putusan memberikan makna baru atau mengisi makna yang hilang dan kosong tersebut. Sekalipun proses pemaknaan terhadap undang-undang atau hukum itu terkadang bersifat inkonsisten misalnya ketika satu putusan menyatakan A dan putusan yang lain menyatakan B. Dalam kasus yang serupa sebagaimana terlihat dalam salah satu judul artikel jurnal kali ini yaitu: “Perbedaan Tafsir Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara Pemilihan Umum Serentak” yang merupakan kajian Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, sekalipun perbedaan putusan itu merupakan proses dinamika dengan alasan-alasan yang khusus, namun bagi pencari keadilan hal itu tentu akan sangat membingungkan.

Secara berturut-turut, Jurnal Yudisial kali ini menghadirkan tulisan mengenai problematik tentang penerapan *vicarious liability*, sebagaimana terlihat dalam kajian Putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012. Prinsip kepentingan terbaik dan urgensi keterangan ahli dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak-anak memperlihatkan masih rentannya anak di dalam sistem hukum, sekalipun aspek perlindungan terhadap anak terus dikumandangkan, tetapi anak lebih banyak menjadi korban dari sistem hukum. Kajian Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr memberikan gambaran tentang rentannya posisi anak dalam hukum. Problem pemidanaan terhadap dokter menjadi menarik untuk dikaji, apakah penjara merupakan alternatif terbaik seorang dokter, atautkah perlu perlakuan yang khusus ketika dokter tersangkut dengan masalah hukum. Pada posisi ini model pemidanaan integratif diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih baik, sebagaimana terlihat dalam artikel studi kasus Putusan Nomor 1110 K/Pid.Sus/2012.

Konsep hukum progresif kembali dijadikan acuan dalam penyelesaian konflik pewarisan dan hibah sebagaimana terlihat dalam kajian Putusan Nomor 95/PDT.G/2008/PN.BKS. Dan terakhir ditampilkan perbandingan kajian putusan ketika membahas prinsip *duty of care*, yaitu prinsip ’pembeli’ melawan ’pembeli’ dalam persoalan tanah sebagaimana tergambar dalam kajian Putusan Nomor 99/Pdt.G/2014/PN.Bwi; Putusan Nomor 230/PDT/2015/PT.SBY; dan Putusan Nomor 952/K/Pdt/2016.

Kami berharap, apa yang disajikan pada edisi kali ini dapat memberikan sebuah gambaran penting, bahwa aturan tidak selalu serta merta menyediakan makna yang

langsung dapat digunakan, karena realitas hukum atau kasus hukum yang terjadi dalam masyarakat selalu dinamis dan berubah dengan sangat cepat. Beberapa tulisan di atas mencoba mengkaji berbagai putusan dengan menghadirkan ulasan kekinian, untuk menggambarkan problematika yang sangat dinamis tersebut. Dengan segala keterbatasan yang ada tulisan-tulisan itu mengurai “melalui kepenuhan makna” yang dapat disajikan, sehingga mudah-mudahan kita dapat memperoleh informasi yang berharga di dalamnya. Terlepas dari semua di atas, makna *abrogatio legis* membawa atau mengingatkan kita bahwa tidak ada undang-undang yang siap pakai sekaligus kita harus lebih berhati-hati menafsirkan hukum dan aturan, bagi kehidupan kita.

Selamat membaca! Terima kasih.

Tertanda  
Pemimpin Redaksi Jurnal Yudisial

<b>PERBEDAAN TAFSIR MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA PEMILIHAN UMUM SERENTAK .....</b>		<b>1 - 16</b>
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008		
Suparto		
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru		
<b>PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI TANPA DIDAKWAKAN DALAM PERSPEKTIF “VICARIOUS LIABILITY” .....</b>		<b>17 - 38</b>
Kajian Putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012		
Budi Suhariyanto		
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA RI, Jakarta		
<b>PENERAPAN PRINSIP “KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK” DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA .....</b>		<b>39 - 57</b>
Kajian Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr		
Y. A. Triana Ohoiwutun & Samsudi		
Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember		
<b>PENJARA TERHADAP DOKTER DALAM PERSPEKTIF MENGIKATNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PEMIDANAAN INTEGRATIF .....</b>		<b>59 - 78</b>
Kajian Putusan Nomor 1110 K/Pid.Sus/2012		
Warih Anjari		
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta		
<b>PENYELESAIAN KONFLIK PEWARISAN AKIBAT HIBAH BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF .....</b>		<b>79 - 97</b>
Kajian Putusan Nomor 95/PDT.G/2008/PN.BKS		
Poniman		
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang		

**MENIMBANG PRINSIP “DUTY OF CARE”:**

**‘PEMBELI’ MELAWAN ‘PEMBELI’**

**DALAM SENGKETA JUAL BELI TANAH ..... 99 - 114**

Kajian Putusan Nomor 99/Pdt.G/2014/PN.Bwi;

Putusan Nomor 230/PDT/2015/PT.SBY;

dan Putusan Nomor 952/K/Pdt/2016

Widodo Dwi Putro & Ahmad Zuhairi

Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram



**JURNAL YUDISIAL**

p-ISSN 1978-6506/e-ISSN 2579-4868

Vol. 10 No. 1 April 2017

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

UDC 347.993; 342.82

Suparto (Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru)

Perbedaan Tafsir Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara Pemilihan Umum Serentak

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008

*Jurnal Yudisial* 2017 10(1), 1-16

Selama ini pemilu presiden dan pemilu legislatif dilakukan secara terpisah atau tidak serentak. Pemilu legislatif selalu dilakukan sebelum pemilu presiden dan wakil presiden. Pemilihan umum yang dilakukan secara terpisah dianggap lebih banyak dampak negatifnya serta tidak sesuai dengan UUD NRI 1945. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pertimbangan hakim konstitusi dalam memutus Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 sehingga terjadi perbedaan dengan putusan sebelumnya Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 terkait dengan pelaksanaan pemilu serentak. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hakim konstitusi dalam memutus Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terjadi inkonsistensi. Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 memutuskan bahwa pemilu presiden dan wakil presiden harus dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilu anggota DPR, DPRD, dan DPRD. Sedangkan dalam putusan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 pada pengujian pasal dan undang-undang yang sama (Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008), Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemilu presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan setelah pemilu

anggota DPR, DPRD, dan DPRD (tidak serentak) adalah tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 (konstitusional). Terjadinya pertentangan putusan ini antara lain disebabkan oleh perbedaan pilihan penafsiran konstitusi.

(Suparto)

Kata kunci: inkonsistensi, mahkamah konstitusi, pemilu serentak.

UDC 347.724

Suhariyanto B (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, MA RI, Jakarta)

Putusan Pemidanaan terhadap Korporasi Tanpa Didakwakan dalam Perspektif “Vicarious Liability”

Kajian Putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012

*Jurnal Yudisial* 2017 10(1), 17-38

Korporasi telah ditetapkan sebagai subjek tindak pidana, maka terhadapnya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana. Sebagai subjek hukum, korporasi juga ditentukan mekanisme pemidanaannya mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 mengesampingkan prosedur hukum acara dengan menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap korporasi tanpa didakwakan. Permasalahannya bagaimanakah eksistensi pemidanaan korporasi menurut hukum acara pidana di Indonesia, dan bagaimanakah pemidanaan korporasi dalam praktik penegakan hukum, serta bagaimana putusan pemidanaan terhadap korporasi tanpa didakwakan dalam perspektif *vicarious liability*? Metode penelitian normatif digunakan untuk menjawab permasalahan ini. Terdapat tiga pendekatan untuk mengkaji permasalahan yaitu

<p>pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Metode analisis yang diterapkan untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas adalah melalui analisis yuridis kualitatif. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif <i>vicarious liability</i>, korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas perilaku seseorang yang secara personifikasi mewakili korporasi sehingga dapat dijatuhkan putusan pidana.</p> <p style="text-align: right;">(Budi Suhariyanto)</p> <p>Kata kunci: putusan pidana, pidana korporasi, <i>vicarious liability</i>.</p>	<p>Prinsip individualisasi pidana dan prinsip <i>double track system</i> sebenarnya dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana narkoba oleh pelaku anak. Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak seharusnya berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sehingga pidana terhadap anak, khususnya pidana perampasan kemerdekaan digunakan sebagai upaya terakhir (<i>ultimum remedium</i>).</p> <p style="text-align: right;">(Y. A. Triana Ohoiwutun &amp; Samsudi)</p> <p>Kata kunci: keterangan ahli, pertanggungjawaban pidana, hukum pembuktian.</p>
<p>UDC 362.7; 351.763</p> <p>Ohoiwutun YAT &amp; Samsudi (Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember)</p> <p>Penerapan Prinsip “Kepentingan Terbaik Bagi Anak” dalam Kasus Tindak Pidana Narkoba</p> <p>Kajian Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2017 10(1), 39-57</p> <p>Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr memutuskan sanksi pidana penjara terhadap anak pengguna narkoba, tanpa disertai tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kewajiban pemeriksaan dokter ahli jiwa untuk menentukan urgensi tindakan rehabilitasi telah dikesampingkan oleh hakim di dalam memutus kasus. Permasalahan yang dikaji meliputi urgensi keterangan ahli dalam pemeriksaan adjudikasi tindak pidana narkoba dan aplikasi prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” dalam penjatuhan sanksi terhadap anak pengguna narkoba. Metode penulisan berbasis pada penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu penelitian hukum kualitatif (<i>qualitative-legal research</i>). Penjatuhan sanksi pidana penjara tanpa tindakan rehabilitasi terhadap anak pengguna narkoba tidak sejalan dengan tujuan pidana.</p>	<p>UDC 343.811; 614.25</p> <p>Anjari W (Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta)</p> <p>Penjara terhadap Dokter dalam Perspektif Mengikatnya Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pidanaan Integratif</p> <p>Kajian Putusan Nomor 1110 K/Pid.Sus/2012</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2017 10(1), 59-78</p> <p>Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007 tidak ditaati oleh Putusan Nomor 1110 K/Pid.Sus/2012. Putusan Mahkamah Konstitusi telah menganulir ancaman pidana penjara dalam Pasal 75 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Putusan Mahkamah Agung tetap menjatuhkan pidana penjara terhadap dokter yang melanggar pasal tersebut. Kondisi ini menimbulkan ketidaksesuaian antara kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dan tujuan penjatuhan pidana yang integratif berdasarkan Pancasila. Masalah dalam tulisan ini adalah bagaimanakah implikasi Putusan Nomor 1110 K/Pid.Sus/2012 dikaitkan dengan kekuatan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi? Dan bagaimanakah implikasi penjatuhan pidana penjara bagi dokter yang tercantum dalam Putusan Nomor 1110 K/Pid.Sus/2012 dikaitkan dengan teori</p>

<p>tujuan pemidanaan integratif? Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat <i>erga omnes</i> sehingga harus diikuti oleh Mahkamah Agung. Pidana penjara terhadap dokter yang tidak menggunakan izin praktik tidak dapat mencapai tujuan pemidanaan integratif. Akibatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak terlayani, dan merugikan profesi dokter. Kesimpulannya adalah putusan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga menjadi tidak efektif dan tujuan pemidanaan integratif berdasarkan Pancasila tidak tercapai.</p> <p style="text-align: right;">(Warih Anjari)</p> <p>Kata kunci: pidana penjara, kekuatan putusan, tujuan pemidanaan integratif.</p>	<p>kualitatif dengan mengutamakan kedalaman data dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dari penelitian ini, realita bahwa anak luar kawin tidak diakui dapat menguasai seluruh harta pewaris dengan hanya berdasarkan pada akta keterangan hibah, mestinya tidak terjadi. Hal ini menunjukkan betapa lemahnya peradilan yang hanya menggunakan hukum <i>formalisme</i> semata, sebagai puncak kepastian hukumnya, sehingga tujuan manfaat dan keadilan belum terpenuhi. Pola hukum progresif berfondasi pada progresivitas manusia, bahwa manusia sebenarnya baik, penuh kasih sayang, saling tolong menolong, dan empati kepada sesama manusia. Berhukum yang benar adalah menghukum yang bertujuan demi tercapainya keadilan masyarakat.</p> <p style="text-align: right;">(Poniman)</p> <p>Kata kunci: hibah, harta warisan, anak luar kawin tidak diakui, hukum progresif.</p>
<p>UDC 347.65</p> <p>Poniman (Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang)</p> <p>Penyelesaian Konflik Pewarisan Akibat Hibah Berdasarkan Hukum Progresif</p> <p>Kajian Putusan Nomor 95/PDT.G/2008/PN.BKS</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2017 10(1), 79-97</p> <p>Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 95/PDT.G/2008/PN.BKS menolak dan menghukum gugatan penggugat untuk membayar biaya perkara, dan memutuskan bahwa harta pewaris seluruhnya menjadi hak anak luar kawin tidak diakui karena hibah dari pewaris. Dari sisi penegakan hukum positif, hakim mendasarkan putusan hanya pada pembuktian tanpa menelusuri realitas dari akta hibah tersebut yang cacat hukum. Kajian penelitian putusan ini menggunakan teori hukum progresif dalam upaya mencari keadilan, dengan mengkaji permasalahan, serta bagaimana penyelesaian konflik pewarisan akibat hibah berdasarkan hukum progresif. Penelitian ini adalah penelitian <i>socio-legal</i> dengan pendekatan induktif yang berparadigma <i>post-positivisme</i>. Penelitian ini dilakukan secara</p>	<p>UDC 332.02</p> <p>Putro WD &amp; Zuhairi A (Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram)</p> <p>Menimbang Prinsip “Duty of Care”: ‘Pembeli’ Melawan ‘Pembeli’ dalam Sengketa Jual Beli Tanah</p> <p>Kajian Putusan Nomor 99/Pdt.G/2014/PN.Bwi; Putusan Nomor 230/PDT/2015/PT.SBY; dan Putusan Nomor 952/K/Pdt/2016</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2017 10(1), 99-114</p> <p>Sengketa jual beli tanah dalam perkara ini menyeret pihak penjual yang telah menjual objek yang sama kepada dua pembeli dalam dua kali transaksi. Pembeli kedua (penggugat) melayangkan gugatannya terhadap pembeli pertama (tergugat II). Posisi hukumnya dilematis. Kedua pembeli sama-sama merasa mempunyai hak atas tanah sengketa karena telah membeli objek yang sama dari penjual. Untuk membuktikan siapa pembeli yang berhak, hakim perlu mempertimbangkan asas “iktikad baik” (<i>good faith</i>), sebagai dasar untuk menentukan pembeli yang patut mendapat perlindungan</p>

hukum. Permasalahannya, kedua pembeli sama-sama mengklaim dirinya adalah pembeli yang beriktikad baik. Sehingga, untuk menilai siapa pembeli yang patut mendapat perlindungan hukum, hakim berpegangan pada prinsip *duty of care*, dengan mempertimbangkan siapa pembeli yang berhati-hati dan cermat memeriksa data yuridis dan data fisik sebelum dan saat jual beli dilakukan. Prinsip *duty of care* ini bersifat abstrak, maka metode penulisan yang digunakan, menelusuri dan mengkaji pendapat para ahli hukum perdata dan agraria untuk didialogkan dengan putusan-putusan hakim. Perkembangan putusan-putusan pengadilan mengenai pembeli beriktikad baik yang mengadopsi prinsip *duty of care*, seharusnya menjadi ‘pegangan’ para hakim dalam menangani kasus yang serupa, untuk menilai kapan pembeli dikategorikan sebagai pembeli beriktikad baik.

(Widodo Dwi Putro & Ahmad Zuhairi)

Kata kunci: iktikad baik, perlindungan hukum, *duty of care*, data yuridis dan fisik.

The Descriptors given are free terms. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.

UDC 347.993; 342.82

Suparto (Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru)

Shifting Interpretations of the Constitutional Court in Deciding the Case of Simultaneous Elections

An Analysis of Constitutional Court Decisions Number 14/PUU-XI/2013 and Number 51-52-59/PUU-VI/2008 (Org. Ind)

*Jurnal Yudisial* 2017 10(1), 1-16

During this time, the presidential and legislative elections are conducted separately or not simultaneously. The Legislative Elections are always carried out prior to the General Elections of the President and Vice President. The general election is conducted separately as considerably having more negative impacts and inconsistency with the 1945 Constitution. This analysis uses descriptive analysis method with the pertinent laws and regulations approach. The formulation of the issue is what the Constitutional Court Justices took into consideration in its Decision Number 14/PUU-XI/2013 leading to differences to that of its previous Decision Number 51-52-59/PUU-VI/2008 concerning the implementation of simultaneous elections. The analysis results show inconsistencies in the consideration of the Constitutional Court Justices in ruling the case through the Decision Number 14/PUU-X/2013 on the judicial review of Law Number 42 of 2008 concerning the General Elections of the President and Vice President. The Constitutional Court Decision Number 14/PUU-X/2013 decided that the General Election of the President and Vice President should be implemented simultaneously with the Legislative Election for the Member of the House of Representatives, the Regional Representatives Council, and the Regional House

of Representatives. As for the previous decision, the Constitutional Court Decision Number 51-52-59/PUU-VI/2008 on the judicial review of the same article and law (Article 3 (5) of Law Number 42 of 2008), the Constitutional Court decided that the elections of the President and Vice President conducted after the Legislative Election for the Member of the House of Representatives, the Regional Representatives Council, and the Regional House of Representatives (not simultaneously) is not contradictory to the 1945 Constitution. The contradiction of these decisions is partly due to the variety of interpretation on the constitution.

(Suparto)

Keywords: inconsistency, the constitutional court, simultaneous elections.

UDC 347.724

Suhariyanto B (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, MA RI, Jakarta)

The Corporate Criminal Liability Without Charges in the Perspective of Vicarious Liability

An Analysis of Court Decision Number 2239 K/PID.SUS/2012 (Org. Ind)

*Jurnal Yudisial* 2017 10(1), 17-38

A corporation has been set as the subject of criminal offense, and so criminal liability on this subject is enforceable by law. As the subject of law, a corporation has its own mechanism in term of criminal liability, starting from investigation process, prosecution and examination before trial. The Supreme Court Decision Number 2239 K/PID.SUS/2012 overruled the ordinances of the procedural law by imposing a sentencing decision against a corporation without charges. The problems are: how does the corporate criminal

<p>liability exist according to the criminal procedural law in Indonesia, and how is the corporate criminal liability implemented in the practices of law enforcement, as well as how is the corporate criminal liability without charges examined through the perspective of vicarious liability? Normative research method is applied in responding to this problem. Three approaches to examine these problems are the statutory regulations, the case-based, and conceptual approaches. The analytical method applied to come to the conclusion of the issues discussed is through the qualitative juridical analysis. The results of discussions deduce that in the perspective of vicarious liability, a corporation is liable for the criminal conduct of a person who is in personification of the corporation and may be subject to corporate criminal liability.</p> <p style="text-align: right;">(Budi Suhariyanto)</p> <p>Keywords: sentencing decision, corporate criminal liability, vicarious liability.</p>	<p>based on normative legal research using secondary data sources. The research data are in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data were analyzed qualitatively through a method of qualitative legal research. Imposing sanction of imprisonment with no rehabilitation measures on the children of drug users is inconsistent with the objective of sentencing. The principle of individualization of punishment and double track system can actually be implemented in the case of narcotic crime involving children offender. The judge in imposing sanctions on the children should be oriented to the measure of best interests of children, so that conviction for a criminal offence against children, particularly deprivation of liberty is done as a last resort (<i>ultimum remedium</i>).</p> <p style="text-align: right;">(Y. A. Triana Ohoiwutun &amp; Samsudi)</p> <p>Keywords: expert witnesses, criminal responsibility, rules of evidence.</p>
<p>UDC 362.7; 351.763</p> <p>Ohoiwutun YAT &amp; Samsudi (Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember)</p> <p>The Implementation of “Best Interest of the Child” in the Narcotics Criminal Case</p> <p>An Analysis of Court Decision Number 229/Pid.B/2012/PN.Jpr (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2017 10(1), 39-57</p> <p>The Court Decision Number 229/Pid.B/2012/PN.Jpr imposed sanctions of imprisonment against the children of drug users without any of medical and social rehabilitation measures. The provision on the examination of the psychiatrist to settle on the urgency of rehabilitation measures have been ruled out by the judges in deciding the case. The problems outlined embrace the urgency of testifying expert witnesses in the adjudication of narcotic crime case and the implementation of the “best interests of the child” measure in the imposition of sanction on the children of drug users. The analytical method used is</p>	<p>UDC 343.811; 614.25</p> <p>Anjari W (Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta)</p> <p>The Imprisonment for Doctors Through the Perspective of Final and Binding Constitutional Court Ruling and Integrated Sentencing</p> <p>An Analysis of Court Decison Number 1110 K/Pid.Sus/2012 (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2017 10(1), 59-78</p> <p>The binding force of the Constitutional Court ruling is final. However, the Supreme Court Decision Number 1110 K/Pid.Sus/2012 does not abide by the Constitutional Court Decision Number 4/PUU-V/2007. The Constitutional Court Decision has annulled the imprisonment penalties in Article 75 paragraph (1), Article 76, Article 79 of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practices. The Supreme Court in its decision imposed the sanction of imprisonment on the doctors violating the aforementioned articles. This condition lead to such a discrepancy between the final and binding</p>

<p>decision of the Constitutional Court and the integrated purposes of sentencing under Pancasila. Formulation of the problems in this analysis meets some points on how the implication of the Supreme Court Decision Number 1110 K/Pid.Sus/2012 regarding the binding force of the Constitutional Court Decision; and how the implication of the imposition of imprisonment sanction for a list of doctors stated in the Supreme Court Decision Number 1110 K/Pid.Sus/2012 in terms of integrated objective of sentencing theory. The research method is a normative juridical by case-based approach. The nature of the decision of the Constitutional Court is erga omnes, that obliges the Supreme Court to act upon. The sanction of imprisonment against the doctors with no consent practices cannot reach the integrated purpose of sentencing. As a consequence, the health services to communities are abandoned and this bring negative impacts on medical profession. To be brief, the decision of the Constitutional Court is considered futile with no binding force, accordingly the integrated purpose of sentencing under Pancasila could not be achieved.</p> <p style="text-align: right;">(Warih Anjari)</p> <p>Keywords: imprisonment, binding force of ruling, integrated purpose of sentencing.</p>	<p>In terms of positive law enforcement, the judges based the ruling solely on proving without probing the legitimacy of the legally flawed grant deed. This analysis employed the theory of progressive laws in an effort to seek justice by studying the problems as well as the conflict settlement of the case of grant-based heir derived from progressive law. This is a socio-legal research study using inductive approach through the perspective of post-positivism. Qualitative research was conducted primarily by collecting references from the experts in the relevant field. From this research, it can be inferred that the granting of ownership to the entire inheritance to the child out of wedlock of no recognition based solely upon a Grant Deed should not have occurred. This indicates just how weak the judiciary is, barely imposing a mere formal law as the culmination of its legal certainty resulting in the unfulfilled objectives of law, those of the benefit and equity. The pattern of progressive law is based on the progression of humans that human beings are actually good, compassionate, mutually helpful to each other, and empathetic for their fellow human beings. Indeed the true law is aimed at achieving social justice.</p> <p style="text-align: right;">(Poniman)</p> <p>Keywords: grant, inheritance, child out of wedlock of no recognition, progressive law.</p>
<p>UDC 347.65</p> <p>Poniman (Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang)</p> <p>The Conflict Resolution of the Grant of Inheritance in Accordance to Progressive Law</p> <p>An Analysis of Court Decision Number 95/PDT.G/2008/PN.BKS (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2017 10(1), 79-97</p> <p>Bekasi District Court Decision Number 95/PDT.G/2008/PN.BKS objected the claim and give sanction to the plaintiff to pay court costs, and decided that all the assets of the testator became solely the possession or title of the child out of wedlock of no recognition owing to the grant of the testator.</p>	<p>UDC 332.02</p> <p>Putro WD &amp; Zuhairi A (Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram)</p> <p>Considering the ‘Duty of Care’ Principle: ‘Buyer’ versus ‘Buyer’ in the Dispute of Land Sale and Purchase</p> <p>An Analysis of Court Decision Number 99/Pdt.G/2014/PN.Bwi; Number 230/PDT/2015/PT.SBY; and Number 952/K/Pdt/2016 (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2017 10(1), 99-114</p> <p>The dispute of land sale and purchase in this case drag the seller who had sold the same object to</p>

two buyers in two transactions. The second buyer (plaintiff) filed a lawsuit against the first buyer (defendant II). Its legal standing created a dilemma. Both buyers felt equally entitled to be the owner of the disputed land, which is the same object purchased from the seller. In providing evidence of the most eligible buyer, the judge should take into consideration the principle of “good faith” as the basis for determining the buyer deserving legal protection. The problem is that both buyers claimed that they were buyers of good faith. Therefore, to appraise which buyer deserving the legal protection, the judges adhered to principle of “duty of care” by taking into account which one of them was carefully and meticulously reading-through the juridical and physical data prior to and during the sale and purchase of the land was conducted. Given the abstract nature of the principle of “duty of care,” the analysis method used in this discussion is exploring and studying the opinions of the experts of civil and agrarian law as to be juxtaposed with the decisions of the judges. The development of court decisions related to the issue of good faith buyers adopting the principle of “duty of care” should serve as a reference for the judges in handling similar cases to determine a good faith buyer.

(Widodo Dwi Putro & Ahmad Zuhairi)

Keywords: good faith, legal protection, duty of care, juridical and physical data.